



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JASRIZAL**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **15277**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 369.500.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
2. Bangunan Seluas 120 m2 di PAYAKUMBUH , Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/126 m2 di PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 29.441.937**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	648.941.937
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	648.941.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.